PERFORMA PENGGUNAAN PRINSIP KERJA SAMA PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KOTA DI SUMATRA BARAT

Asysyifa Hazira Alfi, Ermanto Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Indonesia Email: syifahazira98@gmail.com

Abstract

This study aims to: describe the performance of communication effectiveness in terms of the use of the principle of cooperation in verbal communication by legislative officials and city level party leaders in West Sumatra. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The data of this study are utterances used by legislative officials and city level party leaders in West Sumatra. Data is collected in the following way, (1) downloading video recordings in the form of speeches or interviews from legislative officials and city-level party leaders in West Sumatra from Youtube social media, (2) transcribing video recordings of city-level legislative and party leaders in West Sumatra, (3) observing and analyzing all utterances which are included in language performance and communication politeness, (4) giving code to data which is included in language performance and communication politeness. After all the data is collected, the data is then analyzed by the following steps, (1) identifying data in the form of videos containing interviews and speeches, (2) data then entered into the performance format using the principle of cooperation, (3) data grouped and inserted into part of the principle of cooperation, (4) matching data and giving opinions on data on the principle of cooperation, (5) concluding data included in the principle of cooperation. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that Indonesian Language Performance in Terms of Use of the Principles of Cooperation in Oral Communication by Legislative Officials and Party Leaders The City level in West Sumatra is dominated by the conformity of the cooperative principle of 73%.

Keywords: communication, politeness, legislative officials, Youtube

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memberitahu sesuatu sehingga maksud dan tujuan dapat tersampaikan. Komunikasi yang terjadi tidak hanya dilakukan kepada beberapa orang tetapi bisa disampaikan kepada orang banyak. Penyampaian pesan yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak ramai disebut dengan komunikasi publik

Zaman sekarang, banyak media yang bisa dijadikan wadah untuk bisa memberikan informasi kepada orang banyak. Salah satu wadah tersebut ialah *youtube*. *Youtube* merupakan situs web yang bisa memberikan berbagai macam informasi berbentuk video. Setiap individu bisa menggunakan *youtube* untuk berbagai kepentingan, salah satunya ialah memberikan konten yang bersifat informasi dan pengetahuan. Pejabat politik merupakan salah satu contoh pengguna *youtube* yang memberikan informasi berkaitan tentang politik kepada masyarakat. Video mereka yang bersifat formal ataupun informal bisa dilihat oeh siapa saja. Maka dari itu, pejabat politik harus bisa menjaga sikap dan bahasanya di depan khalayak umum. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah akan membuat performa mereka menjadi bagus di depan publik.

Kesantunan berbahasa menjadi hal yang penting bagi seseorang dalam berkomunikasi. Kesantunan dapat diperlihatkan dengan cara menjaga sopan santun serta etiket yang baik terhadap lawan bicara. Status, profesi, usia, gender serta tingkat keakraban seseorang mempengaruhi bagaimana menggunakan kesantunan tersebut. Situasi juga mempengaruhi bagaimana perilaku serta kesantunan berbahasa seseorang. Dalam situasi formal tentunya harus menggunakan bahasa yang santun dan menjaga etiket sedangkan situasi informal, bahasa dan perilaku tidak terlalu diperhatikan kesantunannya karena dalam situasi ini antara penutur dan lawan tutur terdapat hubungan yang akrab. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa sangat penting dalam berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

UU no 24 Tahun 2009 membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Dalam UU tersebut dibahas tentang berkomunikasi dalam media massa yaitu dalam Pasal 39 ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Menurut Lubis, (2011:5) faktor situasi, siapa pembicara, pendengar, bila dan di mana juga menjadi faktor yang dominan dalam penentuan pemakaian katakata, frasa-frasa dan kalimat-kalimat. Dengan demikian, situasi tutur dapat mempengaruhi penggunaan bahasa baik itu secara formal maupun informal.

Penelitian mengenai performa bahasa dan kesantunan komunikasi sudah pernah dilakukan oleh peneliti berikut.Pertama, Anggrina, Ermanto, Emidar (2018) melakukan penelitian tentang performa penggunaan kosa kata Gubernur dan Wakil Gubernur dalam di *Youtube*. Kedua, Alvionita, Ermanto, Emidar (2018) melakukan penelitian tentang performa bahasa Bupati di Sumatra Barat dari segi penggunaan struktur kalimat. Ketiga, Maiyola, Ermanto, Agustina (2018) melakukan penelitian tentang performa kesantunan berbahasa dari segi penggunaan prinsip kesantunan Wali Kota di Sumatra Barat. Keempat, Ermanto, Agustina, Emidar (2018) melakukan penelitian tentang kesantunan komunikasi pejabat mengenai penggunaan prinsip kesopanan dan prinsip kerja sa,a.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini akan memfokuskan tentang performa penggunaan prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat. Penggunaan prinsip kerja sama penting dilakukan dalam hal berkomunikasi agar performa yang ditampilkan pejabat baik di depan publik. Oleh sebab itu, prinsip kerja sama hendaknya digunakan dengan baik dan benar. Agar pejabat dapat dijadikan panutan oleh masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan dari ujaran yang dihasilkan oleh pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat. Data dikumpulkan dengan cara berikut, (1) mengunduh rekaman video berupa pidato atau wawancara dari pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di SumatraBarat dari media sosial *Youtube*, (2) mentranskripsi rekaman video pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat, (3) mengamati dan menganalisis seluruh tuturantuturan yang termasuk ke dalam performa bahasa dan kesantunan komunikasi, (4) memberi kode kepada data yang termasuk ke dalam performa bahasa dan kesantunan komunikasi. Setelah semua data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan langkahlangkah berikut, (1) mengidentifikasi data berupa video berisi wawancara dan pidato, (2) data kemudian dimasukkan ke dalam format performa penggunaan prinsip kerja sama, (3) data dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam bagian prinsip kerja sama, (4)

mencocokkan data serta memberi pendapat terhadap data prinsip kerja sama, (5) menyimpulkan data yang termasuk ke dalam prinsip kerja sama.

Hasil dari analisis data berpedoman kepada kriteria penilaian yang di jabarkan oleh (Purwanto, 2006:102).Untuk mencari nilai persen yang diharapkan dilakukan mengkalikan pengumpulan jumlah data benar yang diperoleh dengan 100 lalu di bagi dengan skor maksimum ideal.Persentase tersebut dapat menggambarkan tingkat penguasaan.penilaian dengan pedoman penilaian sebagai berikut. (1) sangat baik (86-100%), (2) baik (76-85%), (3) cukup (60-75%), (4) kurang (55-59), (5) kurang sekali (54%).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penulisan ini akan difokuskan pada performa bahasa dan kesantunan komunikasi dari segi penggunaan prinsip kerja sama oleh pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat. Penulis akan menampilkan perwakilan data yang dianalisis yaitu tuturan yang sesuai dengan prinsip kerja sama dan tuturan yang melanggar prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat.

1. Tuturan yang Sesuai dengan Prinsip Kerja Sama Oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kota di Sumatra Barat.

Prinsip kerja sama dibutuhkan agar dapat lebih mudah menjelaskan hubungan antara makna dan daya (Leech, 1993:120). Prinsip kerja sama digunakan dalam kondisi tertentu dan tidak dapat digunakan dengan cara yang sama kepada lawan tutur. Prinsip kerja sama terdiri dari beberapa maksim yaitu, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan dan maksim cara. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

a. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Kuantitas

Di dalam penelitian ini ditemukan 41 data yang sesuai dengan maksim kuantitas. Data ini sesuai dengan indikator dari Leech (1993) yaitu tuturan harus seinformatif yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan salah satu contoh analisis data

tuturan pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatera Barat yang sesuai dengan maksim kuantitas.

(1) Kemudian pusat study quran ini masih terus berlanjut tahun kemaren baru meletakkan batu pertama, dan sekarang sudah kita selesaikan dokumen pembangunannya (F12)

Contoh tuturan (1) sesuai dengan maksim kuantitas. Tuturan tersebut merupakan tuturan dari Ketua DPRD Komisi IV Kota Padang yaitu Maidestal Hari Mahesa. Penutur menghasilkan tuturan yang informatif dan memadai. Penutur memberi informasi kepada lawan tutur jika dokumen pembangunan sudah diselesaikan. Tuturan tersebut bersifat informatif dan tidak berlebihan dalam memberi informasi. Oleh karena itu, contoh tuturan (1) sesuai dengan maksim kuantitas.

b. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Kualitas

Di dalam penelitian ini ditemukan 29 data yang sesuai dengan maksim kualitas. Tuturan tersebut sesuai dengan indikator Leech (1993) penutur mengatakan sesuatu yang ia yakini benar dan dengan bukti yang meyakinkan. Di bawah ini merupakan salah satu contoh analisis tuturan yang sesuai dengan maksim kualitas.

(2) Ya kalau untuk program pemerintah sesuai dengan RPJPD kita yang sudah kita paripurnakan juga pada waktu itu adalah bahwa kita bertekad untuk peningkatan pelayanan publik (R9)

Contoh tuturan (2) sesuai dengan maksim kualitas. Tuturan tersebut merupakan tuturan dari ketua DPRD yaitu Elly Thrisyanti. Ujaran yang dihasilkan penutur sesuai dengan yang sebenarnya. Penutur mengatakan ia sudah melaksanakan paripurna sesuai dengan RPJPD. Ujaran tersebut sesuai dengan indikator maksim kualitas yaitu penutur menghasilkan ujaran yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, contoh tuturan (2) sesuai dengan maksim kualitas.

c. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Relevansi

Di dalam penelitian ini ditemukan 20 data yang sesuai dengan maksim relevansi (hubungan) namun tidak ditemukan data yang melanggar maksim relevansi. Tuturan tersebut sesuai dengan indikator dari Leech (1993) penutur menghasilkan ujaran yang

relevan.Di bawah ini merupakan salah satu contoh analisis tuturan yang sesuai dengan maksim relevansi.

(3) Gak ada untuk kepentingan-kepentingan lain artinya benar membesarkan PAN sesuai dengan kata sambutan dari dewan pimpinan pusat kemaren kan. (N2)

Contoh tuturan (3) sesuai dengan maksim relevansi.Tuturan tersebut merupakan tuturan dari calon ketua DPD PAN Kota Padang yaitu Suparman. Ujaran yang dihasilkannya sesuai dengan maksim relevansi karena ujarannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ujaran yang sesuai dengan maksim relevan yaitu *gak ada untuk kepentingan-kepentingan lain*. Penutur menjawab pertanyaan dari wartawan sehingga topik yang dibahas relevan dengan apa yg di jawab. Oleh karena itu, contoh tuturan (3) termasuk ke dalam tuturan yang sesuai dengan maksim relevan.

d. Tuturan yang Sesuai dengan Maksim Cara

Di dalam penelitian ini ditemukan 19 data yang sesuai dengan maksim cara. Tuturan tersebut sesuai dengan indikator dari maksim cara dari Leech (1993) yaitu penutur harus mengujarkan pernyataan yang jelas, ringkas dan tidak bertele-tele. Di bawah ini merupakan salah satu contoh tuturan yang sesuai dengan maksim cara.

(4) Adapun rincian secara total itu sudah kita rekap keseluruhannya dari Januari sampai desember 2017 (F8)

Contoh tuturan (4) sesuai dengan maksim cara. Tuturan tersebut merupakan tuturan dari ketua DPD PAN Kota Padang yaitu Hendri Septa. Indikator dari maksim cara adalah penutur menghasilkan ujaran yang jelas dan tidak kabur. Penutur menyebutkan ia telah merekap keseluruhan rincian secara total. Tuturan yang dihasilkannya jelas, rinci dan mudah dimengerti serta ujaran yang dihasilkannya tidak bersifat taksa. Oleh karena, contoh tuturan (4) termasuk ke dalam tuturan yang sesuai dengan maksim cara.

2. Tuturan yang Melanggar Prinsip Kerja Sama Oleh Pejabat Legislatif dan Tokoh Partai Tingkat Kota di Sumatra Barat.

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh, tuturan yang melanggar prinsip kerja sama oleh pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat ditemukan pada maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara.

a. Tuturan yang Melanggar Maksim Kuantitas

Di bawah ini merupakan analisis dari pejabat legislative dalam rangka kunjungan tinjau KB di Kota Padang.Tuturan yang dihasilkannya melanggar maksim kuantitas.Adapun analisisnya adalah sebagai berikut.

(5) Anak-anak kita tidak puluhan lo, ratusan anak-anak bahkan dikatakan ribuan mungkin anak-anak sekolah dasar kita kondisinya seperti ini, sanitasinya, sirkulasi udaranya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, bagaimana mungkin ini, anak-anak kita bisa bertarung di puncaknya kan ketingkat nasional nantiknya (B13)

Contoh tuturan (5) merupakan tuturan yang melanggar maksim kuantitas. Tuturan tersebut merupakan tuturan dari ketua DPRD Komisi IV kota Padang yaitu Maidestal Hari Mahesa. Tuturan yang sesuai dengan maksim kuantitas harus bersifat informatif memadai dan tidak berlebihan. Namun penutur melanggar maksim kuantitas karena informasi yang ia berikan berlebihan dan tidak bersifat informatif. Penutur menjelaskan bagaimana keadaan fasilitas yang ada di sekolah namun yang ia jelaskan berlebihan sehingga informasi yang ia berikan tidak. Oleh karena itu, contoh tuturan (5) termasuk ke dalam tuturan yang melanggar maksim kuantitas.

b. Tuturan yang Melanggar Maksim Kualitas

Di bawah ini merupakan tuturan dari pejabat legislatif dalam rangka wawancara mengenai Golkar Kota Padang.Tuturan yang dihasilkannya melanggar maksim kualitas.Adapun analisinya adalah sebagai berikut.

(6) Apa penyebabnya dibelakangnya apakah ini hanya semacam modus atau apa itukan (06)

Contoh tuturan (6) melanggar maksim kualitas.Tuturan tersebut merupaka tuturan dari sekretaris DPD Partai Golkar Padang yaitu Zulhardi Z Latif. Indikator maksim kualitas adalah penutur menghasilkan ujaran yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Namun dari tuturan di atas tampak bahwa penutur mengatakan hal yang belum tentu terjadi. Ujaran tersebut bisa saja menimbulkan perselisihan dengan pihak

lain. Apa yang penutur ujarkan tersebut masih belum tentu kebenarannya namun ia mengucapkan di depan media massa. Oleh karena itu, contoh tuturan (6) melanggar maksim kualitas.

c. Tuturan yang Melanggar Maksim Cara

Di bawah ini merupakan tuturan dari tokoh partai mengenai pemilihan ketua PAN. Tuturan yang dihasilkannya melanggar maksim cara. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut.

(7) Kunjungan kerja lah ini segala macam kan seperti itu yang selama ini terjadi seperti itu (N4)

Contoh tuturan (7) melanggar maksim cara. Tuturan tersebut merupakan tuturan dari calon ketua DPD PAN Kota Padang yaitu Suparman. Maksim cara menuntut penuturnya untuk menghasilkan ujaran yang jelas dan tidak bertele-tele. Namun, pada contoh tuturan (7) ujaran yang dihasilkan penutur bersifat taksa serta tidak mudah dimengerti. Tuturan yang bersifat taksa yaitu *kunjungan kerja lah ini segala macam kan seperti itu*. Ujaran yang dihasilkan penutur tidak jelas dan bertele-tele. Oleh karena itu,contoh tuturan (7) termasuk ke dalam tuturan yang melanggar maksim cara.

D. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah, pejabat legislatif dan tokoh partai mampu menerapkan prinsip kerja sama dalam berkomunikasi. Tuturan yang sesuai dengan prinsip kerja sama lebih dominan daripada tuturan yang melanggar prinsip kerja sama. Oleh karena itu kesantunan dalam komunikasi lisan dari segi prinsip kerja sama pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra barat di dominasi oleh kesesuaian dalam penggunaan prinsip kerja sama yaitu sebanyak 73% dari 150 data, ditemukan 109 data yang sesuai dengan prinsip kerja sama dan 41 data yang melanggar prinsip kerja sama.

Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat mempengaruhi bagaimana performa seseorang di mata orang lain. Penggunaan bahasa yang baik dari segi penggunaan prinsip kerja sama sangat penting bagi seseorang khususnya kalangan pejabat legislatif dan tokoh partai. Jika pejabat tersebut tidak dapat memahami kaidah bahasa maka performanya tidak akan bagus di depan publik oleh karena itu,

penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat dibutuhkan agar performanya bagus di depan publik dan dapat dijadikan panutan.

Daftar Rujukan

- Alvionita, Ermanto, Agustina. (2018). "Performa Bahasa Indonesia Dari Segi Penggunaan Struktur Kalimat Bupati Di Sumatra Barat Dalam Youtube". *Bahasa dan Sastra* Vol 5. No 2.
- Anggrina, Ermanto, dan Emidar. (2018). "Performa Penggunaan Kosa Kata oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat di dalam *Youtube".Bahasa dan Sastra* Vol 5. No 2. p.59-69
- Emidar, Ermanto, Agustina. (2018). "Politeness Communication of Officials in West Sumatra: Review of Principles of politeness and principles of Cooperation Perspective. ICLLE *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 263. Januari 2018.*p.315-319
- Leech, G. (1993). Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lubis, Hamid Hasan. (2011). Analisis Wacana Pragmatik. Bandung: PT. Angkasa.
- Maiyola, Ermanto, Agustina. (2018). "Performa Kesantunan Berbahasa Indonesia dari Segi Penggunaan Prinsip Kesantunan Walikota di Sumatra Barat. *Bahasa dan Sastra* Vol 5. No 2. p. 75-84
- Purwanto, Ngalim. (2006). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.*